

NEGARA DAN MAAF 1965

APAKAH pemerintah Joko Widodo layak minta maaf kepada "korban 1965"? Mengapa? Apa artinya "meminta maaf"? Cukupkah meminta maaf menyelesaikan masalah? Kalau ada permintaan maaf kepada "komunis", mengapa tidak untuk mereka yang nonkomunis dan merasa pernah dizalimi komunis?

Itulah sebagian dari rangkaian pertanyaan yang diperdebatkan dalam Simposium Nasional Tragedi 1965 (Jakarta, 18-19 April 2016). Sebagian besar sudah lama diperdebatkan sebelum Simposium dan masih diperdebatkan publik sesudah Simposium berakhir.

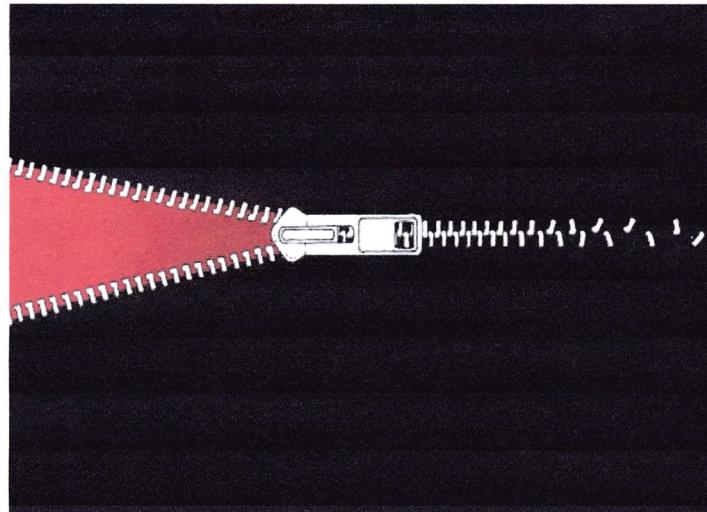
Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak dapat dijawab secara memadai jika dipisahkan dari pertanyaan yang lebih mendasar, yakni apa yang terjadi sejak 1965? Siapa yang paling bertanggung jawab? Bagi saya, serangkaian tindak kekerasan (tidak terbatas pada pembunuhan) yang berlangsung berpuluhan tahun sejak akhir 1965 merupakan sebentuk Terorisme Negara, bukan konflik horizontal antargolongan dalam masyarakat. Yang telah menjadi korban bukan hanya kaum komunis dan pendukungnya.

Bagi yang berminat, uraian tentang Teror Negara itu pernah saya susun dalam buku *State Terrorism and Political Identity in Indonesia: Fatally Belonging* (London: Routledge, 2005). Uraian panjang-lebar tak mungkin dan tak perlu diulang di sini. Cukup disebutkan secara singkat di sini bahwa peristiwa kekerasan sejak 1965 hanya mungkin terlaksana berkat sponsor besar-besaran dari aparatur Negara.

Hal itu perlu ditekankan berulang kali karena sebagian besar diskusi publik tentang 1965 terkecoh oleh kisah tentang konflik horizontal antara kubu pro dan kubu antikomunis. Kerangka berpikir demikian merupakan inti propaganda resmi Orde Baru selama setengah abad terakhir. Ia mengendap dalam benak tiga generasi Indonesia.

Seakan-akan yang terjadi sejak akhir 1965 adalah amarah spontanitas "massa" terhadap komunis. Karena dendam bertumpuk atas keganasan politik komunis beberapa tahun sebelum 1965. Lalu meledak setelah dihasut propaganda tentara bahwa pada 30 September 1965 PKI "memberontak" terhadap pemerintah Sukarno. Ironisnya, Sukarno dan para menteri kabinet serta pendukungnya ikut diserang dalam kampanye antikomunis dengan tuduhan mereka terlibat pemberontakan terhadap pemerintahan mereka sendiri.

Kerangka berpikir "1965-sebagai-konflik-horizontal" juga dominan dalam Kerangka Acuan untuk Simposium 1965 itu. Semua tema untuk pembahasan dua hari penuh berkisar pada apa yang salah dalam "masyarakat" Indonesia dan bagaimana "masyarakat" berusaha mengatasi sejarah kelamnya. Sebuah konsep kolonial yang sangat rasis, "amuk", disebut-sebut sebagai teori yang layak dikaji. Salah seorang pembicara di sesi akhir hari pertama Simposium berpendapat bahwa masyarakat kita masih "belum beradab", karena terbukti suka menggunakan kekerasan untuk menyerang lawan politiknya, baik yang komunis maupun kelompok minoritas agama.



Dalam jadwal resmi Simposium, tidak ada satu pun sesi yang secara khusus diharapkan membahas peran dan tanggung jawab negara dalam banjir darah 1965. Istilah "negara" sama sekali tidak dipakai dalam rumusan tema dan judul sesi. Juga menarik, tidak ada gugatan atau protes dari para peserta Simposium terhadap kerangka acuan tersebut hingga di sesi terakhir hari pertama.

Sebagai pembicara yang diberi giliran terakhir di sesi terakhir pada hari pertama, saya membahas secara khusus peran Negara dalam banjir darah 1965. Juga tentang lenyapnya pembahasan tentang hal itu selama hari pertama Simposium. Saya bukan satu-satunya pembicara yang menyadari hal itu. Tapi, di antara sedikit pembicara sebelum saya yang menyebut hal ini, semua hanya menyingsing selintas dalam uraian mereka yang fokusnya tentang hal lain. Saya membenarkan diri menjadi pembicara pertama yang secara khusus memfokuskan seluruh waktu yang tersedia untuk membahas kejahatan negara.

Saya bersyukur Simposium pada hari kedua memberi perhatian yang lebih besar terhadap peran dan tanggung jawab Negara. Bahkan, dalam pidato penutupan Simposium, Sidarto Danusubroto menekankan keterlibatan Negara dalam apa yang seakan-akan menjadi konflik horizontal.

Kerangka berpikir "1965-sebagai-konflik-horizontal" tidak hanya membebaskan Negara dari gugatan politik, moral, kultural, dengan atau tanpa gugatan legal, sebagai penanggung jawab terbesar banjir darah 1965. Bila kita mereproduksi kerangka berpikir itu, kita ikut meneruskan tradisi Orde Baru mengadu domba antargolongan dalam masyarakat.

Kuatnya politik adu domba di balik kerangka berpikir "1965-sebagai-konflik-horizontal" menghambat upaya penyelesaian masalah. Upaya demikian, dari kubu mana pun, dengan mudah dicurigai sebagai upaya membela satu pihak



ARIEL HERYANTO*

dalam berbagai kasus, termasuk kasus 1965, yang berasal sebelum tahun itu dan berlanjut puluhan tahun sesudahnya. Pertanggungjawaban itu jelas tidak sebatas pada pernyataan resmi kenegaraan meminta maaf kepada para korban. Jika ada, permintaan maaf merupakan sikap santun yang menyertai pengakuan kejahatan berat (bukan sekadar kesalahan atau kekhilafan tak sengaja) serta komitmen untuk mengupayakan secara maksimal perbaikan status dan hak mereka yang menjadi korban serta tindakan nyata untuk menghindarkan terulangnya kejahatan sejenis.

Di pihak lain, konsep "korban" perlu dipahami lebih luas dan adil ketimbang yang selama ini dipakai dalam diskusi publik dan telah direproduksi dalam Simposium ataupun dalam acara *Mata Najwa* di televisi (27 April 2016). Benar anggota PKI dan berbagai organisasi pendukungnya menjadi korban kekejaman yang luar biasa. Juga sanak keluarga mereka. Mereka layak diberi tempat dalam forum resmi. Tapi korban Terorisme Negara selama ini jauh lebih banyak jumlah atau pun ragamnya. Bukan hanya ditambah beberapa gelintir keluarga jenderal yang terbunuh pada 30 September atau 1 Oktober 1965.

Jumlah mereka yang tidak terlibat dalam konflik politik 1965 tapi ikut terbunuh, tersiksa, terbuang, dan terpenjara tanpa pengadilan sejak 1965 mungkin sebanyak atau lebih banyak daripada korban yang pernah terlibat aktif dalam PKI atau organisasi pendukungnya. Mereka tidak mewakili "kubu komunis". Mereka tidak terwakilkan sebagai "korban" dalam banyak forum. Sama juga nasib mereka yang dipaksa (dengan ancaman jika menolak) ikut membantu membasmikan "komunis", yakni saudara, tetangga, atau sahabatnya sendiri. Tidak sedikit dari mereka yang menderita trauma berpuluhan tahun.

Ribuan korban lain berjatuhan akibat kampanye Negara yang disebut "bersih diri" dan "bersih lingkungan" pada 1980-1990-an. Tidak sedikit di antara mereka adalah pejabat negara yang diserang oleh lawan dan pesaing politiknya. Puluhan juta kaum muda yang dilahirkan sejak 1980-an dicuci otak lewat kurikulum sekolah yang berisi sampah propaganda Orde Baru. Bukankah mereka "korban" juga?

Pemerintah Republik Indonesia telah bersih ganti sejak 1965, tapi sebagian besar hak, wewenang, dan tanggung jawab negara tidak gugur dan berganti-ganti karena perubahan itu, termasuk utang finansial kepada negara lain atau utang politik dan moral kepada bangsanya. Saat ini peran dan fungsi negara itu berada di tangan pemerintah Jokowi.

Hal ini tidak dengan sendirinya menggugurkan tanggung jawab individu pejabat negara atau swasta sebagai pelaku dan sponsor kekerasan yang terkait dari pemerintah sebelumnya. Pada kenyataannya, perbedaan antara pemerintah Orde Baru dan sesudahnya tidak perlu dibesar-besarkan. Tidak sedikit elite politik Orde Baru yang tetap berkuasa dalam pemerintahan yang sekarang. Juga ideologi mereka. ●

* PROFESOR PADA THE SCHOOL OF CULTURE, HISTORY, AND LANGUAGE
AUSTRALIAN NATIONAL UNIVERSITY

dan merugikan pihak lain. Selama faktor kejahatan Negara diabaikan, seakan-akan tidak ada penyelesaian untuk 1965 yang baik bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Kuatnya kerangka berpikir "1965-sebagai-konflik-horizontal" juga mendorong sebagian orang untuk membina rujuk atau rekonsiliasi di antara dua kubu yang dianggap paling berkepentingan. Ini terjadi baik di dalam Simposium maupun di luarnya. Padahal masalah yang kita hadapi merupakan persoalan bangsa secara menyeluruh (bukan dua kubu), dengan Negara sebagai penanggung jawab kuncinya. Bukan konflik atau rujuk antarkubu yang bersengketa politik. Itu sebabnya, permintaan maaf secara pribadi (dan bukan resmi kenegaraan) dari seorang Presiden Abdurrahman Wahid tidaklah cukup.

Konflik horizontal antara pro dan antikomunis bukannya tidak ada. Tapi konflik itu terlalu kecil dalam skala masalah yang kita bahas. Seandainya konflik horizontal itu dibarkan berkobar sendiri, tanpa campur tangan Negara, ia akan berbentuk bentrokan lokal yang sporadis dan acak. Jika ada korban nyawa, jumlahnya puluhan atau beberapa ratus. Sulit membayangkan akan mencapai angka seribu. Tapi, kalau ternyata korban 1965 mencapai ratusan ribu dalam waktu singkat, peran Negara dapat dipastikan tidak kecil.

Tidak ada peristiwa kekerasan massal di mana pun bisa meliputi wilayah luas, berlangsung dalam masa yang panjang, dan memakan banyak korban jika tidak disponsori negara. Di Indonesia, pola ini terjadi berulang kali, bukan hanya "kasus 1965". Apa yang disebut "penembakan misterius" (1983-1984) bukan pertempuran antarpemimpinan jalanan. Kekerasan seksual, penjarahan, dan pembakaran sebagian wilayah Jakarta pada Mei 1998 bukan amarah massa yang didorong kebencian rasial.

Negara layak dituntut bertanggung jawab atas kejadian